

UPAYA VIETNAM DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIANNYA MELALUI SEKTOR PERDAGANGAN INTERNASIONAL TAHUN 2001-2006

Christine W. Honesty

*Alumni Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: cris_0011@ymail.com

ABSTRACT

This study discusses the Vietnamese government's efforts in improving its economy through international trade sectors in 2001-2006. The background of this study was the change in government policy on the Vietnam that previously focused on state ideology, be a policy that focuses on economic growth called Doi Moi policy. Since Doi Moi imposed, the Vietnamese government has become more open in terms of cooperative relationships with other countries but especially in the sector of international trade. It later became the main platform issues examined in this study, namely how Vietnamese government's efforts in improving its economy through international trade sector. Those problems were analyzed using descriptive methods by making the theory of Economic Growth and Structural Change as a basis for argument. From the theoretical approach is given, while the response that Vietnam's efforts in improving its economy through international trade sectors in the years 2001-2006 implemented through the international economic cooperation.

Key Words : *Doi Moi, Economic Growth, Structural Change, BTA, WTO*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah Vietnam dalam meningkatkan perekonomiannya melalui sektor perdagangan internasional pada tahun 2001-2006. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah Vietnam dari yang sebelumnya fokus pada ideologi negara, menjadi kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang disebut kebijakan Doi Moi. Sejak Doi Moi diberlakukan, pemerintah Vietnam menjadi lebih terbuka dalam hal hubungan kerjasama dengan negara-negara lain khususnya dalam sektor perdagangan internasional. Hal tersebut kemudian menjadi pijakan utama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana upaya pemerintah Vietnam dalam meningkatkan perekonomiannya melalui sektor perdagangan internasional. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan menjadikan teori *Economic Growth* dan *Structural Change* sebagai dasar argumen. Dari pendekatan teoritik yang diberikan, jawaban sementara bahwa upaya Vietnam dalam meningkatkan perekonomiannya melalui sektor perdagangan internasional pada tahun 2001-2006 diimplementasikan melalui adanya kerjasama ekonomi internasional.

Kata Kunci : *Doi Moi, Pertumbuhan Ekonomi, Perubahan Struktural, Kerjasama Ekonomi Internasional, BTA, WTO.*

PENDAHULUAN

Sejak perang Vietnam melawan Amerika Serikat berakhir pada tahun 1975, bagi pihak Vietnam perang tersebut sangat berdampak buruk bagi seluruh rakyat Vietnam dan dampak dari perang ini telah menyisakan kehancuran dimana-mana. Krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, korupsi pemerintah, serta warga negara yang melarikan diri ke negara lain. Terhitung kurang lebih dua juta orang meninggal saat perang terjadi dan ratusan orang mengalami cedera, yaitu terdiri dari warga sipil dan tentara. Tentunya butuh pengobatan dan penyembuhan khusus bagi para

Upaya Vietnam Dalam Meningkatkan Perekonomiannya Melalui Sektor Perdagangan Internasional Tahun 2001-2006.

korban tersebut. banyak bangunan yang rusak dan rata dengan tanah, hasil pertanian dan perkebunan yang hancur serta banyak para wanita dan anak-anak yang menjadi korban atas perang ini mengakibatkan Vietnam mengalami krisis yang buruk dalam segala aspek (Canu Jean.1978). Vietnam yang pada saat itu sedang dalam proses pembangunan ekonomi dimana masyarakat Vietnam berusaha agar dapat bangkit dari kemiskinan namun para elit politik justru mengalihkan perhatiannya pada isu politik. Hal ini menyebabkan ketidak efisiennya pemerintah Vietnam dalam menangani kebijakan ekonomi yang telah dibuat, di samping itu terjadi adanya korupsi dalam kubu pemerintah dan tidak berjalan dengan baik program-program ekonomi terencana yang telah disepakati sebelumnya. Pada akhirnya krisis ekonomi yang terjadi pasca perang ini masih tetap tidak kunjung selesai dan Vietnam mengalami kemunduran yang terus meningkat. hingga pada tahun 1986 pemerintah Vietnam yang masih di dominasi oleh Partai Komunis Vietnam (PKV) memutuskan untuk membuat perombakan dan pembaharuan kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi (Mohsin Ayub. 2008).

Melalui keputusan para pembuat kebijakan maka pemerintah sepakat untuk membuat kebijakan baru, yaitu *Doi Moi* (reformasi ekonomi). *Doi Moi* diberlakukan pada tahun 1987, sejak awal diberlakukan kebijakan *Doi Moi* pemerintah membuat gebrakan baru yaitu lebih memfokuskan program pembangunan ekonomi dan fokus utama pemerintah yaitu dalam sektor pertanian, perdagangan dan sektor industri. Awal keberhasilan kebijakan *Doi Moi* pada tahun 1990 di buktikan dengan semakin meningkatnya perekonomian Vietnam dalam berbagai sektor khususnya dalam pertanian, perdagangan dan industri. Adanya pasar bebas di Vietnam menyebabkan ekspor impor mulai mengalami peningkatan dan Vietnam dapat membuktikan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju di dunia internasional. Pada tahun 1990 Vietnam mampu mencapai pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) tahunan sebesar 7%, hingga tahun 1997 Vietnam naik mencapai angka pertumbuhan GDP sebesar 13% dan mencapai angka pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi yaitu sekitar 27,7% (ANU E Press Board.2003).

Peningkatan yang semakin pesat ini membuat Vietnam terus berupaya meningkatkan perekonomiannya sehingga Vietnam dapat terus menekan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Vietnam ini merupakan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah Vietnam, pemerintah sangat berharap dengan peningkatan ini Vietnam dapat terus bangkit dalam menata perekonomian di negaranya agar dapat mensejahterahkan seluruh masyarakat di Vietnam. Pada tahun 2001 prospek pertumbuhan ekonomi Vietnam semakin mengalami peningkatan, dalam angka pertumbuhan ekspor mengalami peningkatan menjadi 28% dan terus meningkat menjadi 28,5% pada tahun 2003. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2004 dan 2005 dimana angka pertumbuhan ekspor naik 5% menjadi 29% dan terus bertumbuh di tahun 2006 (Thay Kim Cuc. 2009).

Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktural Sebagai Landasan Adanya Kerjasama Ekonomi Internasional Yang Diimplementasikan melalui BTA dan WTO.

Menurut Walt Whitman Rostow teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul "*The Stages of Economic Growth*" menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi lima yaitu Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*), Masyarakat Transisional atau Masyarakat Pra Kondisi Tinggal Landas (*The Preconditions for Take Off*), Lepas Landas (*The Take Off*), Bergerak ke Kedewasaan (*Maturity*), dan Konsumsi Masal Tinggi (*High Mass Consumption*). Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan

kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya (Endang Mulyani. 2012).

Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* perkapita. Dalam hal ini berkaitan dengan *output* total (*Gross Domestic Product*) dan jumlah penduduk, karena *output* perkapita adalah *output* total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, kenaikan *output* perkapita harus dianalisis dengan melihat apa yang terjadi dengan *output* total di satu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain, pertumbuhan ekonomi mencakup GDP total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Mudrajat Kuncoro. 2000).

Structural Change Theory yaitu suatu negara mengubah struktur mode ekonominya dari sektor ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Ada dua tokoh besar yang mengembangkan teori ini, yang pertama adalah W. Arthur Lewis. Menurut Lewis, ia mengembangkan teori ini menjadi dua fokus utama "*Two Sector Surplus Labor*" yang pertama yaitu sektor pertanian tradisional (pedesaan subsistem) dan yang kedua sektor industri modern (industri perkotaan). Dimana Lewis menjelaskan bahwa *surplus labor* dari sektor pertanian ditransfer sedikit demi sedikit ke sektor industri modern dengan tahapan perkembangan dan pendidikan juga pelatihan untuk calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Perhatian utama model ini adalah pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja dari desa ke kota serta pertumbuhan produksi dan kesempatan kerja di sektor modern. Perkembangan sektor modern ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri, sedangkan tingkat upah di perkotaan cukup lebih tinggi untuk menarik tenaga kerja dan desa ke kota tetapi tidak naik dengan terlalu cepat. Yang dimaksudkan agar proses ini berjalan dengan baik ialah bahwa keuntungan yang diperoleh di sektor modern ditanam kembali dalam sektor modern (dan tidak di alirkan ke bank di luar negeri), dan digunakan untuk perluasan usaha (bukan untuk membeli barang modal yang lebih canggih yang justru menghemat tenaga kerja). Juga diharapkan tenaga kerja yang tidak terampil yang mengalir dari desa ke kota semuanya bisa ditampung di sektor modern (Arsyad Lincoln. 2004). Menurut Chenery, sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri dan perdagangan. Chenery membuat pengelompokan negara sesuai dengan proses perubahan struktural yang dialami berdasarkan tingkat pendapatan per kapita penduduknya (Irawan, dan Suparmoko. 1981).

Faktor-faktor yang penting antara lain adalah kelancaran transisi dari pola perekonomian agraris ke perekonomian industri, kesinambungan akumulasi modal fisik dan manusia, perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok ke berbagai macam barang dan jasa, perkembangan daerah perkotaan terutama pusat-pusat industri berkat migrasi para pencari kerja dari daerah-daerah pertanian di pedesaan dan kota-kota kecil, serta pengurangan jumlah anggota dalam setiap keluarga dan kenaikan populasi pada umumnya. Para orang tua pun menjadi lebih mementingkan kualitas (pendidikan) anak dari pada sekedar kuantitasnya. Model ini dikembangkan oleh Hollis Chenery yang menyarankan adanya perubahan struktur produksi, yaitu pergeseran dari produksi barang pertanian ke produksi

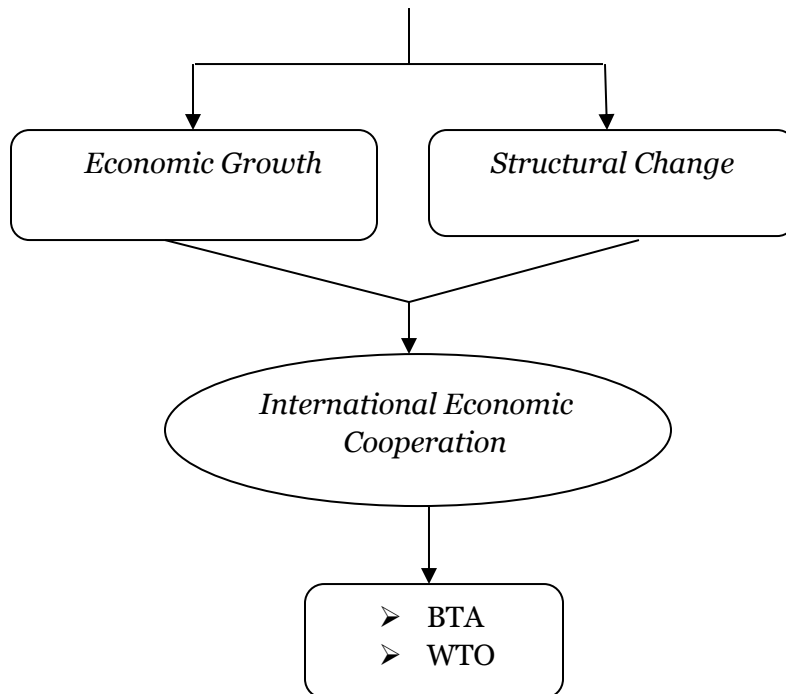
Upaya Vietnam Dalam Meningkatkan Perekonomiannya Melalui Sektor Perdagangan Internasional Tahun 2001-2006.

barang industri pada saat pendapatan per kapita meningkat (M. Meirer, Gerald, Robert E Baldwin. 1997).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kerjasama internasional memiliki peranan yang sangat penting. Hubungan dan kerjasama antar negara timbul dikarenakan adanya kekayaan alam dan kemajuan industri yang tidak berimbang, sehingga memaksa negara untuk membentuk sebuah kerjasama yang bersifat internasional di berbagai sektor tersebut. Pandangan Mochtar dalam menganalisa dampak positif adanya kerjasama internasional yaitu dapat memberikan wadah yang memungkinkan bagi setiap negara untuk melakukan pola hubungan internasional. Negara bisa berinteraksi secara lebih intens dengan negara lain, karena negara tersebut telah menyetujui aturan-aturan yang dianut dalam ketentuan dalam kerjasama internasional tersebut (Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agus. 2003).

Adapun tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yang pertama yaitu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu dapat menjual ke negara lain sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang kedua meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerja sama ekonomi dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi di dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya meningkat. Yang ketiga memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Karena ketercukupan sumber-sumber produksi maka proses produksi bisa berjalan. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja. Yang keempat meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi dari pada di dalam negeri. Oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan penjualan meningkat. Yang kelima membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang keenam membantu membebaskan kemiskinan. dengan adanya kerjasama ekonomi internasional antar negara maka pertumbuhan ekonomi di dalam negeri akan meningkat dan negara dapat mengatasi masalah kemiskinan di dalam negeri. Yang ke tujuh memajukan perdagangan dengan maksud meningkatkan kemakmuran negara-negara anggota, dan yang terakhir dapat memperkuat rasa persahabatan antar negara. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat menjadi semakin baik. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan (Dharma Bima. 2014).

Adapun faktor-faktor yang mendorong adanya kerjasama ekonomi internasional antar negara yaitu yang pertama terbatasnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Jenis barang dan jasa yang di butuhkan penduduk suatu negara sangat beragam. Di sisi lain kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan itu sangat terbatas. Penyebabnya antara lain karena tidak memiliki sumber daya alam atau teknologi. Yang kedua karena adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial-budaya. Hal ini sangat berpengaruh karena tiap-tiap negara memiliki sumber daya alam, iklim dan sosial-budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga karena tuntutan era globalisasi, adanya globalisasi menyebabkan tidak ada satupun negara di dunia yang dapat hidup sendiri. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, negara tersebut melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Yang ke empat yaitu adanya keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Setiap kerjasama ekonomi yang dijalankan suatu negara pada dasarnya dilandasi keinginan untuk memperoleh keuntungan. Bentuk keuntungan seperti kegiatan ekspor dan pemasukan devisa negara (Widya Lilis. 2013).



KERJASAMA PERDAGANGAN BILATERAL VIETNAM DAN AMERIKA SERIKAT

Kerjasama bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik kebudayaan dan struktur ekonomi. Kerjasama bilateral selalu berada tatanan konsep jika tidak dalam bentuk kerjasama pasti melalui paham konflik. Hal ini kemudian didasarkan penerapan hubungan internasional dan cara untuk mempengaruhi rival negara yang saling bekerjasama. Sementara, menurut Didi Krisna kerjasama bilateral diartikan dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara (Krisna Didi. 1993).

Sedangkan menurut Juwondo, hubungan bilateral merupakan hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan perdamaian dan memberikan nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral itu. *Bilateral Trade Agreement* (BTA) adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Kerjasama antar dua negara ini terjadi karena adanya kesepakatan antar kedua belah pihak dalam mengurangi tarif perdagangan, kuota, jasa dan hambatan-hambatan lain dalam perdagangan internasional yang dimana telah mendapatkan persetujuan antar kedua negara terkait (Juwondo. 1991).

Dalam melakukan hubungan kerjasama bilateral, ada beberapa poin-poin penting dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral. Adapun poin-poin tersebut meliputi segi kualitas, kuantitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam artian bahwa keterampilan

Upaya Vietnam Dalam Meningkatkan Perekonomiannya Melalui Sektor Perdagangan Internasional Tahun 2001-2006.

untuk mengarahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan, kredibilitas ancaman dan ketergantungan, derajat kebutuhan serta responsibilitas di kalangan pembuat keputusan (Holsty K.J dan Azhary M. Tahir. 2000). Kerjasama perdagangan yang terjadi antara Vietnam dan Amerika Serikat terus mengalami pertumbuhan setelah BTA diberlakukan. Kerjasama BTA Vietnam dan Amerika Serikat meliputi dua hal, antara lain mencakup perdagangan barang (*trade in goods*), dan perlindungan terhadap hak intelektual kepemilikan properti (*protection of intellectual property rights*). BTA dapat dikatakan sebagai suatu komitmen oleh kedua belah pihak untuk menciptakan kebutuhan terhadap barang, bisnis, dan kebutuhan nasional untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar lain. Pada tahun 2001, rangkaian proses *Bilateral Trade Agreement* diawali dengan penandatanganan *Bilateral Trade Agreement* yang dilakukan oleh presiden George W. Bush pada 16 Oktober di Washington D.C, kemudian dilanjutkan dengan ratifikasi *Bilateral Trade Agreement* oleh *Vietnam National Assembly* pada tanggal 28 November. Kemudian *Bilateral Trade Agreement* tersebut ditandatangani secara hukum oleh presiden Vietnam, Tran Duc Luong pada tanggal 7 Desember. Pada tahun 2002, pihak Vietnam melakukan beberapa kali kunjungan ke Amerika Serikat, diantaranya pada tanggal 10 Mei dan pada tanggal 18 Mei perdana menteri Vietnam, Phan Van Khai diundang oleh presiden Amerika Serikat ke Washington DC untuk membicarakan masalah perdagangan antara Vietnam dan Amerika Serikat. Kunjungan tersebut menandakan keseriusan kedua negara dalam menjalin kerjasama, baik di bidang ekonomi maupun politik serta menghantarkan Vietnam pada integrasi ekonomi global (Tooke, T. and W. Newmarch. 2007).

Adapun pernyataan dari perdana menteri Vietnam Phan Van Khai pada waktu itu tentang hubungan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dalam pidatonya yaitu,

“We plan to establish a good cooperation in all fields, especially in the economic field, where we agreed to help each other, especially in relation to the bilateral cooperation. although previously we have a history of poor relations, but now we are looking forward to the bilateral cooperation between our sense of friendship can be established, so that we can help each other in overcoming economic problems between the countries concerned.”

Pernyataan ini semakin diperkuat oleh George Walker Bush, presiden Amerika Serikat yang pada saat itu menyambut positif pidato dari perdana menteri Vietnam.

“We are no longer enemies, let the past be the past history. now it is the bond of friendship that is reflected in the bilateral cooperation relations between us. Our hope with this cooperative relationship trust and stronger friendship between the two sides.”

Yang dimaksudkan bahwa hubungan kedua negara pada masa lalu kurang baik namun pada masa sekarang hubungan diantara kedua belah pihak terjalin dengan sangat baik dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama bilateral antar kedua negara tersebut. Dari pihak Amerika Serikat ataupun Vietnam sangat berharap besar dengan hubungan kerjasama yang terjalin baik ini karena melalui adanya kerjasama bilateral antar kedua negara ini, selain dapat mempererat rasa persahabatan namun juga dapat saling menguntungkan (O'Brien, D.P. 2008).

Adapun keuntungan Vietnam dari kerjasama bilateral ini yaitu, yang pertama agar dapat meningkatkan angka ekspor yang tinggi sehingga Vietnam dapat semakin menumbuhkan perekonomiannya. Yang kedua yaitu untuk dapat memperkenalkan produk-produk dari

Vietnam ke luar negeri khususnya di Amerika Serikat agar Vietnam dapat menembus pasar domestik Amerika Serikat. Yang ketiga adanya rasa kepercayaan dari para investor asing khususnya investor Amerika Serikat, sehingga dapat membuka peluang dalam berinvestasi. Dan yang keempat yaitu menjalin hubungan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak (Ashley, P. 2004).

Ada tiga faktor pendorong dalam terbentuknya hubungan kerjasama bilateral, adapun faktor-faktor pendorong tersebut yang pertama adalah adanya kepentingan bersama dalam memperkuat kerjasama bilateral secara komprehensif demi perkembangan dan kesejahteraan masing-masing negeri, demi kebahagiaan rakyat masing-masing negeri. Yang kedua, kedua negara mempunyai kepentingan bersama dalam mendorong kerjasama antar kawasan serta turut menjamin perdamaian, stabilitas, kerjasama dan kesejahteraan di Asia Pasifik, khususnya mempertahankan perdamaian, keamanan, keselamatan dan kebebasan maritim dan kebebasan penerbangan di laut timur di atas dasar menghormati hukum internasional. Yang ketiga kedua negara mempunyai kepentingan bersama dalam melakukan kerjasama dan mengkoordinasi upaya-upaya untuk memberikan sumbangan pada masalah-masalah bersama di dunia dengan martabat sebagai satu anggota yang bertanggung jawab dari komunitas internasional (Tulus Tambunan. 2004).

Phan Van Khai menyebutkan delapan isi yang akan dilaksanakan Vietnam dan Amerika Serikat untuk membawa hubungan bilateral maju terus menerus ke depan. Yaitu memperkuat, saling pengertian, membangun dan memperkokoh kepercayaan politik (dalam kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi), bekerjasama di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (pendidikan, pelatihan, kesehatan serta lingkungan hidup), bekerjasama di bidang-bidang pertahanan dan keamanan, masalah hak asasi manusia, bekerjasama dalam masalah-masalah regional dan internasional (The Global Review. 2010).

Pada tahun 2002 Amerika Serikat mengimpor beberapa produk dari Vietnam seperti kopi, kayu, tekstil dan garmen. Dan pada tahun yang sama Amerika Serikat mengeksport beberapa bahan mentah seperti kapas dan barang-barang elektronik dan alat transportasi. Selain itu Amerika Serikat juga merupakan investor terbesar bagi Vietnam. Dapat dikatakan bahwa Vietnam merupakan salah satu negara yang pasarnya mengalami pertumbuhan pesat bagi ekspor Amerika Serikat. Hal tersebut menandakan suksesnya implementasi *Bilateral Trade Agreement* yang memiliki pengaruh yang penting bagi aspek ekonomi dan politik Vietnam sehingga Vietnam mampu meningkatkan kualitas dagangnya di bidang ekspor (Liepmann, H. 2010).

Kedua negara juga meningkatkan pertukaran budaya dan hubungan kemanusiaan antar bangsa, serta terus berusaha untuk mengesampingkan perbedaan diantara kedua negara, saling memelihara keamanan dan kedamaian dengan tujuan menyelesaikan isu perbatasan dalam beberapa tahap. Dalam hal ekspor dan investasi, Amerika Serikat mengeksport barang-barang elektronik yang berteknologi tinggi untuk di pasarkan ke Vietnam. Seperti contohnya komputer, handphone, televisi, dan alat-alat rumah tangga. Menteri Perdagangan Vietnam mengatakan bahwa barang-barang elektronik yang di perkenalkan oleh Amerika untuk di pasarkan ke Vietnam inilah yang pada akhirnya secara perlahan membuat masyarakat Vietnam sangat berdampak positif bagi masyarakat Vietnam sehingga masyarakat Vietnam dapat menggunakan dan mengetahui serta mengkonsumsi barang-barang elektronik dari Amerika Serikat (Brandy J. 2004).

Pengaruh langsung dari BTA adalah inisiasi bebas tarif dari pihak AS atas ekspor Vietnam, hal itulah yang menyebabkan peningkatan ekspor Vietnam ke AS. Volume ekspor terus bertambah secara cepat dan pertambahan ini sangat berpengaruh pertumbuhan ekspor Vietnam di tahun

Upaya Vietnam Dalam Meningkatkan Perekonomiannya Melalui Sektor Perdagangan Internasional Tahun 2001-2006.

2004, 2005, dan 2006, setelah terjadi kemajuan yang sama di tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2001 sampai 2003. Pertumbuhan ekspor tersebut dipicu oleh peningkatan kelompok ekspor tekstil dan garmen. Secara keseluruhan dari tahun 2001 sampai 2006, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat 25% (Ade Noor. 2011).

Pada Desember 2006 Vietnam dan Amerika Serikat menormalisasi kerjasama bilateral mereka melalui kerjasama yang dikenal dengan nama *Permanent Normal Trade Relation* (PNTR). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan status hubungan perdagangan antar keduanya. *Permanent Normal Trade Relation* merupakan perjanjian dalam kerjasama bilateral diantara kedua negara terkait yang dimana telah menormalisasikan status hubungan dagang kedua negara tersebut yang telah di setujui oleh pihak-pihak yang terkait. Beberapa pokok hubungan dagang BTA Vietnam dan Amerika Serikat antara lain, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat signifikan setelah dilakukannya BTA dimana Amerika Serikat menjadi pasar terbesar bagi ekspor Vietnam hanya dalam kurun waktu dua tahun setelah di implementasikannya BTA. Vietnam mendominasi ekspor barang-barang manufaktur bagi Amerika Serikat seperti produk ekspor primer. Terbentuknya hubungan dagang antara Vietnam-Amerika Serikat terealisasi dengan dilakukannya *Bilateral Trade Agreement* (BTA). BTA merupakan kesempatan baru bagi Vietnam untuk bergabung dengan WTO dan memperkuat hubungan kerjasama dalam berbagai aspek dengan negara-negara lain (Vinlie D. 2003).

Tekstil dan garmen merupakan salah satu sektor ekspor paling penting Vietnam. Dengan dua juta pekerja, seperempat dari seluruh lapangan kerja industri dan dua ribu lima ratus perusahaan, industri tekstil dan pakaian menjadi sumber utama lapangan kerja industri, terutama untuk kaum perempuan serta merupakan industri terkemuka untuk industrialisasi dan pertumbuhan keseluruhan. Ekspor garmen dan tekstil Vietnam dalam empat bulan pertama tahun 2002 mencapai 1,74 miliar dolar Amerika, dan akhirnya meningkat sebesar empat puluh lima persen dibanding tahun lalu, tekstil dan garmen memimpin tingkat pertumbuhan ekspor Vietnam dari barang ekspor lainnya (Nghiep, Le Thanh, Le Huu Quy. 2008). Ekspor kayu menduduki peringkat kedua setelah tekstil dan garmen dari produk Vietnam. Diperkirakan dari produk kayu Vietnam bisa meraih US\$ 6,54 miliar, naik sebesar 12,7 persen dari tahun sebelumnya. Sementara Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang menjadi negara tujuan utama ekspor kayu Vietnam. Vietnam memiliki lebih dari 2.000 perusahaan pengolahan kayu, dimana mempekerjakan 250.000 pekerja di dalam negeri, yang sebagian besar industri pengolahan kayu terletak di kota Ho Chi Minh serta Provinsi Binh Duong, Dong Nai, dan Binh Dinh (ISWA. 2006).

Vietnam menjadi negara kedua di kawasan Asia Tenggara yang mengekspor banyak produk yang terbuat dari kayu. Menurut laporan dari Menteri Perdagangan Vietnam, pada tahun 2006 nilai ekspor mencapai 15%. Tidak hanya di Amerika Serikat saja, produk kayu Vietnam diekspor ke seratus dua puluh negara. Asosiasi Produk Hutan dan Kayu Vietnam (*Viforest*) menetapkan target strategis untuk terus dapat meningkatkan ekspor kayu Vietnam ke mancanegara (Lia Amalia. 2007). Vietnam memiliki iklim *monsoon* (hujan lebat) tropis, dengan kelembaban rata-rata 84% sepanjang tahun. Vietnam mengekspor biji kopi ke sembilan puluh negara, Amerika Serikat merupakan pelanggan terbesar Vietnam, Amerika Serikat juga merupakan pembeli terbesar kedua kopi hijau Vietnam (setelah Jerman). Vietnam juga mengekspor sejumlah kecil kopi panggang bubuk dan campuran kopi 3-in-1 ke Amerika Serikat. Penjualan Vietnam tidak terbatas pada pasar utama di Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Produksi kopi di Vietnam adalah semua biji kopi yang dihasilkan di negara Vietnam. Produksi kopi telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Vietnam sejak permulaan abad ke-20. Industri kopi Vietnam berkembang melalui sistem perkebunan, dan kini menjadi kekuatan ekonomi utama di negara ini. Sebagian besar produsen kopi adalah perusahaan swasta atau badan usaha milik

negara, seperti Trung Nguyên, Hung Phat, Tam Chau, Viet Pacific atau yang lebih dikenal sebagai *Vietcoffee*, dan *Vinacafe* (Perusahaan Kopi Nasional Vietnam). *Highlands Coffee*, produsen kopi swasta, adalah perusahaan swasta pertama di Vietnam yang pernah didaftarkan kepada seorang Vietnam Perantauan (International Coffee Organization. 2005).

Vietnam merupakan salah satu negara yang dapat membuka diri dan mau memberikan banyak kesempatan bagi para investor asing untuk menanam modal di Vietnam. Awal diberlakukan undang-undang tentang kepemilikan properti pihak asing oleh Vietnam dimulai sejak kebijakan *Doi Moi* diberlakukan. Pada tahun 2008 (satu tahun setelah Vietnam resmi bergabung dengan WTO) undang-undang tentang kepemilikan properti pihak asing di Vietnam mulai mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan pemerintah Vietnam mencanangkan program pertumbuhan ekonomi pada pencapaian target sebesar 280 miliar dollar AS dalam kurun waktu lima tahun (CIEM dan CIDA. 2006). Adapun faktor-faktor yang membuat Vietnam menjadi salah satu tujuan utama para investor asing untuk mau melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Vietnam antara lain yang pertama, biaya tenaga kerja yang rendah. Faktor keunggulan komparatif ini hingga saat ini masih merupakan salah satu penarik PMA di sektor-sektor atau industri-industri berteknologi menengah dan rendah seperti tekstil dan pakaian jadi, alat-alat elektronik rumah tangga, alas kaki, makanan dan minuman dan industri-industri lainnya yang sifatnya *footloose* (MPI dan PriceWaterhouse Coopers. 2007).

Vietnam mengeluarkan empat undang-undang resmi yang menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap PMA. Antara lain yang pertama UU Investasi 2005 dan ketetapan-ketetapan terkait. Kedua, undang-undang dan regulasi-regulasi sektoral. Ketiga, jadwal dari komitmen-komitmen spesifik mengenai sektor jasa dibawah kesepakatan menjadi anggota WTO dan yang keempat, hambatan-hambatan resmi untuk penggabungan dan akuisisi dari perusahaan-perusahaan domestik. UU Investasi 2005 menetapkan tiga jenis sektor, yaitu Sektor-Sektor yang tertutup bagi investasi swasta, sektor-sektor yang boleh dimasuki oleh investasi swasta dengan berbagai syarat ketat dan sektor-sektor yang bebas sepenuhnya bagi investasi swasta (MPI. 2007).

Kerjasama Multilateral Vietnam

Kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Setelah melalui upaya pengajuan proposal yang memakan waktu cukup lama selama dua belas tahun, majelis umum WTO menyetujui proposal pengajuan diri Vietnam pada November 2006 yang kemudian diresmikan pada tanggal 11 Januari 2007. Keanggotaan tersebut menandakan bahwa Vietnam telah terintegrasi sebagai anggota masyarakat dunia, yang mana Vietnam harus siap menerima penerapan setiap instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh WTO (Hendarsah Amir. 2011). Menurut perdana menteri Vietnam Phan Van Khai, dalam pidatonya pada waktu itu menjelaskan bahwa Vietnam menyadari integrasi dalam organisasi internasional sangat penting untuk menunjang pembangunan suatu negara. Bergabung dalam organisasi ekonomi internasional membantu Vietnam membuka pasar bebas dan menyokong perdagangan bebas. Bergabung dalam WTO membawa peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi Vietnam. Vietnam sebagai negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu bagaimana menghadapi dan menjaga hubungan baik dengan organisasi ekonomi internasional. Di abad kedua puluh satu saat globalisasi berkembang, batas antar negara sudah tidak menjadi suatu kendala lagi dan membuat akses antar negara lebih mudah dijangkau (Duncan C. 2011).

WTO merupakan tempat dimana negara-negara saling berhadapan satu sama lain, untuk membicarakan tentang hambatan perdagangan dan kemudian membantu menegosiasikan

Upaya Vietnam Dalam Meningkatkan Perekonomiannya Melalui Sektor Perdagangan Internasional Tahun 2001-2006.

untuk meliberalisasikan perdagangan. Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non tarif (misalnya regulasi), menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya (Bambang Cipto. 2007). Tujuan umum dari WTO adalah liberalisasi ekonomi untuk memfasilitasi perdagangan yang diikuti dengan upaya-upaya reduksi untuk menghapus setiap hal yang menjadi penghambat perdagangan dalam barang dan jasa. Bagi setiap negara anggota yang melakukan tindakan penolakan atau mengabaikan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian (tidak patuh) akan dikenakan tindakan hukum (sanksi) yang ditetapkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa DSM (*Dispute Settlement Mechanism*). Selain itu Pembentukan WTO dan tujuan kebijakan WTO sudah ditetapkan dalam pembukaan persetujuan WTO dimana tujuan tersebut untuk meningkatkan standar hidup, menjamin pekerjaan penuh dan besar dan terus berkembang volume pendapatan riil dan permintaan yang efektif, dan memperluas produksi perdagangan barang dan jasa (Ehrman, J. 2001).

Suatu negara yang berkeinginan untuk mengakses WTO sebelumnya harus mengajukan permohonan kepada Dewan Umum dan harus menjelaskan seluruh aspek perdagangan dan ekonomi kebijakan yang berdampak pada perjanjian WTO. Setelah semua informasi latar belakang yang diperlukan telah diperiksa, pihak WTO menentukan syarat dan kondisi para calon anggota baru yang akan masuk ke dalam WTO dan dapat mempertimbangkan masa transisi untuk memungkinkan negara-negara pemohon untuk mendapatkan kelonggaran dalam mematuhi aturan WTO (Do Hoai Nam. 2012). Setelah Dewan Umum atau menyetujui persyaratan akses, negara pemohon harus meratifikasi protokol akses sebelum dapat menjadi anggota WTO. Beberapa negara mungkin menghadapi lebih keras dan proses akses lebih lama karena tantangan selama negosiasi dengan anggota WTO lainnya. WTO mempunyai anggota 149 negara serta 32 negara pengamat yang sudah mendaftar untuk menjadi anggota. Perjanjian WTO mengikat secara hukum oleh karena itu negara anggota yang tidak mematuhi perjanjian bisa diadukan oleh negara anggota lainnya karena dapat merugikan mitra dagangnya, serta negara anggota yang melanggar akan menghadapi sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh WTO. Hal inilah yang akhirnya mendorong Vietnam untuk ikut dalam keanggotaan WTO (Linda Tarigan. 2012).

Pada tahun 2007 Vietnam resmi menjadi anggota WTO yang ke 150. keanggotaan Vietnam dalam WTO mengalami transformasi. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Vietnam menyampaikan bahwa Vietnam mengalami kemajuan domestik yang sangat pesat dan merupakan partner dagang yang potensial, sehingga memungkinkan bagi pihak Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan bilateral. Untuk menjadi bagian dari anggota WTO ada beberapa syarat atau perjanjian yang di keluarkan oleh WTO untuk Vietnam. Pada 20 Februari 2007 Vietnam mengeluarkan surat keputusan yang berisi bahwa Vietnam menyetujui seluruh semua ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh WTO (Thayer Carlyle.2006). Adapun syarat-syarat yang di keluarkan oleh WTO untuk Vietnam yaitu, yang pertama WTO meminta Vietnam untuk mengurangi atau mencabut banyak bea impor dimana sebagian besar barang pada akhirnya akan dikenai tarif nol atau tarif dibawah 35%. Yang kedua yaitu menghapus banyak subsidi untuk industri tekstil serta mengizinkan bank-bank asing mendirikan anak perusahaan yang seluruhnya saham dimiliki oleh pihak asing tersebut. Dengan adanya beberapa persyaratan yang diajukan oleh pihak WTO kepada Vietnam, diharapkan dapat saling memahami dan menerima serta dapat saling menguntungkan antar kedua belah terkait (Kartasumendra, H.S. 2008).

Pada 17 Maret 2008 Perdana Menteri Nguyen Tan Dung menandatangani ketentuan-ketentuan dari WTO yang diberikan untuk Vietnam. Setelah surat keputusan telah ditandatangani dan disepakati antar kedua belah pihak, Vietnam mulai memberlakukan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Adapun pendapat dari Perdana Menteri Vietnam dalam menghadiri konferensi WTO pada saat itu mengatakan bahwa,

“This is a great opportunity for Vietnam to join the WTO membership. we accept any form of the terms and conditions provided by the WTO. Vietnam's economy is increasingly growing very well and we believe that by joining the WTO Vietnam will continue to experience economic growth with very well.

Pada bulan September 2008, Vietnam mulai mengurangi bea impor dan beberapa jenis barang impor yang masuk ke Vietnam seperti elektronik, dan bahan-bahan mentah diberikan tariff yang rendah sebesar 10%. Pada bulan Desember 2008 pemerintah Vietnam memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk berinvestasi dan mendirikan perusahaan-perusahaan di Vietnam, serta adanya penghapusan subsidi yang berlebihan bagi industri tekstil. Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Tran Quoc Khanh, yang juga menjadi Kepala Perunding Pemerintah Vietnam tentang perdagangan internasional mengatakan bahwa sejak masuk WTO sampai sekarang, Vietnam melaksanakan secara serius komitmen-komitmen WTO tentang membuka pasar yang lebih terbuka dan transparan serta selangkah demi selangkah menyempurnakan kerangka hukum, membentuk lingkungan bisnis yang setara, menciptakan pasar ekonomi yang liberal, menciptakan syarat yang kondusif bagi para investor asing didalam dan diluar negeri untuk melakukan produksi dan bisnis (Ramayanti. 2013).

Pada tahun pertama Vietnam masuk WTO tahun 2007, total nilai barang ekspor dan impor meningkat 10% (sama dengan 26,52 miliar dolar Amerika). Sebelumnya pada tahun 2005 nilai ekspor mencapai lebih dari 132 miliar dolar Amerika, meningkat 5% dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sama dengan 17,6 miliar dolar Amerika dan di tahun-tahun berikutnya terus menerus mengalami surplus perdagangan sejak masuk WTO. Pada tahun 2008 Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menuturkan, bahwa pemerintah Vietnam telah menyusun kebijakan strategi ekspor untuk menciptakan tenaga pendorong guna membantu badan-badan usaha meningkatkan daya saing di pasar internasional dan mengembangkan perekonomian negaranya. Adanya nol tarif dan bebas bea masuk dalam perdagangan internasional, membuat akses kegiatan ekspor Vietnam semakin lancar dan baik. Vietnam merasa sangat menyambut baik dengan adanya beberapa peraturan yang mengistimewakan bagi negara-negara anggota yang masih dalam kategori negara berkembang yang ditetapkan oleh WTO (Erica Smith. 2010).

Pada tahun 2008 Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menuturkan, bahwa pemerintah Vietnam telah menyusun kebijakan strategi ekspor untuk menciptakan tenaga pendorong guna membantu badan-badan usaha meningkatkan daya saing di pasar internasional dan mengembangkan perekonomian negaranya. Adanya nol tarif dan bebas bea masuk dalam perdagangan internasional, membuat akses kegiatan ekspor Vietnam semakin lancar dan baik. Vietnam merasa sangat menyambut baik dengan adanya beberapa peraturan yang mengistimewakan bagi negara-negara anggota yang masih dalam kategori negara berkembang yang ditetapkan oleh WTO (Phan and Ramstetter. 2006). Menteri Perdagangan, Truong Dinh Tuyen juga akan membuat rencana untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati oleh WTO dan menyerahkannya kepada Pemerintah untuk disetujui dalam pertemuannya. Pemerintah meminta semua Kementerian dan Sektor-Sektor yang bertanggung jawab untuk membuat rencana, memberikan dan menggunakan bantuan teknik asing secara efektif untuk melaksanakan komitmen tersebut (Nguyen Thi Kim Cuc. 2007).

Upaya Vietnam Dalam Meningkatkan Perekonomiannya Melalui Sektor Perdagangan Internasional Tahun 2001-2006.

Ada tiga hal utama yang ditekankan oleh WTO. Pertama, mengenai komitmen Vietnam dalam perdagangan barang. WTO menyodorkan daftar sebanyak 560 halaman dari tarif, kuota, subsidi pertanian untuk segera dikurangi. Pertanian adalah sektor yang mendapat banyak sorotan dalam perdagangan barang internasional. Vietnam harus berkomitmen di WTO untuk mengurangi tarif dan subsidi domestik. Kedua, kewajiban Vietnam dalam jasa. Dalam dokumen sebanyak 60 halaman (juga sebuah jadwal) disebutkan bahwa akses jasa harus diberikan kepada penyedia jasa asing, dan untuk kondisi lain harus menghapuskan pembatasan kepemilikan perusahaan jasa oleh asing. Dan ketiga, tim pekerja akses Vietnam ke WTO telah merumuskan dasar hukum dan institusional yang harus diterapkan Vietnam mengarah kepada liberalisasi perdagangan. Kesediaan Vietnam untuk merubah sistem perekonomiannya memudahkan Vietnam masuk sebagai anggota baru WTO. pada tahun 2010 Vietnam mencanangkan penurunan bea cukai di tahun-tahun mendatang serta memudahkan investor asing untuk masuk ke pasar Vietnam (Ardi Sutoto. 2012).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang upaya pemerintah Vietnam dalam meningkatkan perekonomiannya melalui perdagangan internasional pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Jawaban sementara yang diberikan oleh penulis adalah bahwa upaya pemerintah Vietnam dalam meningkatkan perekonomiannya melalui perdagangan internasional pada tahun 2001 sampai 2006 dianalisa dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi dan teori perubahan struktural. Teori pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menganalisa tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi Vietnam pasca diberlakukan kebijakan *Doi Moi* pada tahun 2001. Adapun kondisi perekonomian Vietnam pasca berakhir perang ideologi, mengalami banyak penurunan dan terjadi kemiskinan yang berkepanjangan. Dengan adanya kebijakan *Doi Moi* adanya peningkatan dalam perekonomian dan Vietnam khususnya dalam perdagangan internasional.

Sedangkan teori perubahan struktural digunakan untuk menganalisa proses pertumbuhan ekonomi Vietnam, dimana perekonomian Vietnam pada saat itu termasuk dalam kategori negara yang masih menerapkan standar ekonomi tradisional. Vietnam merubah arah kebijakan yang sebelumnya lebih fokus ke ideologi berubah menjadi suatu kebijakan reformasi ekonomi yang dimana pemerintah Vietnam lebih meningkatkan kualitas perdagangan internasionalnya, dari sistem pasar yang sebelumnya terpusat menjadi terbuka. Dengan demikian pemerintah Vietnam berharap perubahan kebijakan dan sistem pasar Vietnam dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Vietnam. Berdasarkan teori dan data yang disajikan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diberikan oleh penulis terbukti benar. Upaya pemerintah Vietnam dalam meningkatkan perekonomian di negaranya melalui sector perdagangan internasional pada tahun 2001-2006 adalah dengan merubah kebijakan luar negeri pemerintah serta sistem perdagangan internasional Vietnam.

Hal ini dibuktikan sejak pemerintah merubah kebijakan sebelumnya menjadi kebijakan *Doi Moi* yang dimana memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi di negaranya, Vietnam dapat mengembangkan berbagai sektor yaitu pada sektor perdagangan, industri, pertanian, pembangunan dan lain-lain. Khususnya dalam sektor perdagangan, bagaimana peran Vietnam dalam meningkatkan perekonomian negara pasca kebijakan *Doi Moi* diberlakukan.

Pemerintah Vietnam merubah sistem ekonomi dari terpusat menjadi terbuka, serta pemerintah Vietnam membuka diri untuk ikut dalam berbagai macam organisasi perdagangan dunia, baik dalam kerjasama bilateral maupun multilateral. Dalam hubungan kerjasama bilateral, Vietnam

menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dalam sektor perdagangan internasional. Bagi Vietnam, menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat adalah kesempatan baik yang berdampak positif untuk perekonomian Vietnam. Karena dengan adanya kerjasama bilateral ini, dapat membuka akses bagi Vietnam untuk melakukan ekspor berbagai macam barang dari dalam negeri untuk dipasarkan ke Amerika Serikat seperti tekstil dan garmen, kayu, kopi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Canu Jean. 1978. *Sejarah Amerika Serikat*. Jakarta: Pustaka Rakyat
- Mudrajat Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN. Hal 35
- Arsyad Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, cetakan ke-2, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Hal 36
- Irawan, dan Suparmoko. 1981. *Ekonomi Pembangunan*, edisi ketiga, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Hal 57-58
- M. Meirer, Gerald, Robert E Baldwin. 1997. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Dana Buku Indonesia. Hal 71-74
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agus. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta Krisna Didi. 1993. "Kamus Politik Internasional" Grasindo: Jakarta. Hal 33
- Juwondo. 1991. "Hubungan Bilateral; Definisi dan Teori" Rajawali Press, Jakarta. Hal 17-19
- Holsty K.J dan Azhary M. Tahir. 2000. "Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis" Erlangga, Jakarta. Hal 25
- Tooke, T. and W. Newmarch. 2007. "Bilateral and Free Trade Area" London: Longman, Brown, Green, Longmans and Robert. Hal 40
- O'Brien, D.P. 2008. "Vietnam's Future : International Economic Cooperation" New York: Cambridge University Press. Hal 19-21
- Ashley, P. 2004. "Vietnam and US" New York: Cambridge University Press. Hal 77-79
- Tulus Tambunan. 2004. "Globalisasi dan Perdagangan Internasional" Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal 20-21
- Liepmann, H. 2010. "Tariff Levels and the Bilateral Economic Cooperation" New York: Macmillan. Hal 3-5
- Brandy J. 2004. "Vietnam's to The Future" University Press and Harvester Wheatsheaf. Hal 6
- Vinlie D. 2003. "Dumping: A Problem in International Trade" Chicago: University of Chicago Press. Hal 13
- Nghiep, Le Thanh, Le Huu Quy. 2008. "Measuring the Impact of Doi Moi on Vietnam's Gross Domestic Product" Asian Economic Journal. Vol 1 Hal 4-6
- ISWA. 2006. "Revitalisasi Industri Kayu Olahan Menuju Industri Yang Kompetitif", Kadin Roadmap Industri, Kadin Indonesia. Hal 2
- Lia Amalia. 2007. "Ekonomi Internasional" Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 19-22
- International Coffee Organization. 2005. "Priceelasticity of Demand and Coffee Consumption in Importing Countries" International Coffee Organization, London.
- CIEM dan CIDA. 2006. "Research Report: The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth in Viet Nam" Laporan Penelitian, Hanoi. Hal 101-104
- MPI dan PriceWaterhouse Coopers. 2007. "Vietnam Tax Incentives & Policies" October, Ministry of Planning and Investment of Vietnam, Hanoi. Hal 73-76
- MPI. 2007. "Vietnam. A Guide for Business and Investment" Januari, Hanoi: Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and Investment of Vietnam. hal 22

Upaya Vietnam Dalam Meningkatkan Perekonomiannya Melalui Sektor Perdagangan Internasional Tahun 2001-2006.

- Hendarsah Amir. 2011. *“Vietnam dan WTO”* Yogyakarta, Galangpress. Anggota Ikapi
- Bambang Cipto. 2007. *“Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 52
- Ehrman, J. 2001. *“The World Trade Organization in International Relation”* Cambridge: Cambridge University Press. Hal 42-45
- Kartasumendra, H.S. 2008. *“GATT dan WTO” Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan.* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hal 9-11
- Nguyen Thi Kim Cuc. 2007. *“The Politics Of Economic Reform in Vietnam: A Case Of State-Owned-Enterprise Equitization”* New York, Routledge. Hal 21

Artikel Jurnal Online

- Mohsin Ayub. 2008. *Strategi Ekonomi Vietnam* (online) (<http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg44757.html>, diakses pada 12 Juni 2015)
- ANU E Press Board.2003. *“Viet Nam: A Transition Tiger?, The Introduction of Doi Moi”* (online) (<http://press.anu.edu.au/wp-content/docs/conference/02/ch0611.pdf>, diakses pada 20 juni 2015)
- Thay Kim Cuc. 2009. *The Politics Of Economic Reform In Vietnam: A Case Of State-Owned-Enterprise Equitization,* (online) (<https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/16846/NguyenTKC.pdf?sequence=1>), diakses pada 9 Oktober 2015)
- Endang Mulyani. 2012. *New Growth Theory,* (online) (<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dr.%20Endang%20Mulyani,%20M.Si./EKO.%20PEMB%20-%20Teori%20Pembangunan.pdf> , diakses pada 23 Juni 2015)
- Dharma Bima. 2014. *Kerjasama Ekonomi Internasional,* (online) (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9txsvRRw4UJ:https://antarmateri.googlecode.com/files/Bima9-s1-kerjasama%2520ekonomi%2520internasional.pptx+&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada 7 Agustus 2015)
- Widya Lilis. 2013. *Faktor Penyebab Kerjasama Ekonomi Internasional,* (online) (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9txsvRRw4UJ:https://antarmateri.googlecode.com/files/Eko9-s1-faktor%2520%2520penyebab%2520Kerjasama%2520ekonomi%2520internasional.pptx+&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada 7 Agustus 2015)
- The Global Review. 2010. *AS Dan Vietnam Rundingkan Kerjasama Ekonomi Internasional* (online) (https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=Vietnam+dan+Amerika+rundingkan+kerjasama+ekonomiWqz4JJ <http://www.theglobal-review.com>, diakses pada 8 November 2015)
- Ade Noor. 2011. *Bilateral Trade Agreement* (online) (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9txsvRRw4UJ:http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/613>, diakses pada 7 November 2015)
- Duncan C. 2011. *Joining WTO become Growth Vietnam’s Economy* (online) (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9txsvRRw4UJ:https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2007/CAR051A.htm>, diakses pada 8 November 2015)
- Do Hoai Nam. 2012. *“Opportunities and Challenges for Vietnam In WTO Accession”* (online) (<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&act=8&ved=0CEoQFjAGahUKEwi7->

- [fGP3ZPJAhUDlAaYKHAYAArk&url=http%3A%2F%2Fresources.worldbank.org%2FINTRANETTRADE%2FResources%2FWBI-Training%2Fvietnamaccession_nam.pdf&usg=AFQjCNFvfqZ-1uLnl8rOzLDFnUTtrZozbQ&bvm=bv.107467506.d.dGo](http://www.gdp3ZPJAhUDlAaYKHAYAArk&url=http%3A%2F%2Fresources.worldbank.org%2FINTRANETTRADE%2FResources%2FWBI-Training%2Fvietnamaccession_nam.pdf&usg=AFQjCNFvfqZ-1uLnl8rOzLDFnUTtrZozbQ&bvm=bv.107467506.d.dGo), diakses pada 9 November 2015)
- Linda Tarigan. 2012. *Aturan-Aturan dalam WTO* (online) (<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjADahUKEwi94bSb5ZPJAhUleaYKHdj9AKs&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F3095%2F1%2FBAB%2520I%2CV.pdf&usg=AFQjCNHviN2qm7T6q7cP4GlC9uv79fpcww&bvm=bv.107467506.d.dGo>, diakses pada 10 November 2015)
- Thayer Carlyle. 2006. *U.S., Vietnam Sign Bilateral Trade Agreement Moves Vietnam A Step Closer to Full Integration into the World Economy*, (online) (http://www.ustr.gov/Document_Library/Fact_Sheets/2006/Section_Index.html, diakses pada 3 September 2015)
- Ramayanti. 2013. *Ketentuan dalam WTO* (online) (https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAGahUKEwi94bSb5ZPJAhUleaYKHdj9AKs&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F41014%2F3%2FChapter%2520II.pdf&usg=AFQjCNF94yWaUlobMBRcZHImjO_EWSjURQ&bvm=bv.107467506.d.dGo, diakses pada 12 November 2015)
- Erica Smith. 2010. *World Trade Organization and Economic Cooperation* (online) (https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwjhnZqhj5TJAhUFpZQKHS2dBNY&url=https%3A%2F%2Fwww.wto.org/world-trade-organization-and-economic-cooperation%2Fres_e%2Fdoload_e%2Finbr_e.pdf&usg=AFQjCNEk_CPTHnpYyo5wRy01mol3wD1TiQ&bvm=bv.107467506.d.dGo, diakses pada 12 November 2015)
- Ardi Sutoto. 2012. *Keanggotaan dalam WTO* (online) (<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAEahUKEwi94bSb5ZPJAhUleaYKHdj9AKs&url=http%3A%2F%2Fwww.kemendag.go.id%2Ffiles%2Fpdf%2F2013%2F04%2F17%2Ftrade-keanggotaan-tpr-indonesia-dalam-wto-id01366188288.pdf&usg=AFQjCNGcRV1j8mpsDXM8Pxosb5BHIEpAUQ&bvm=bv.107467506.d.dGo>, diakses pada 13 November 2015)